

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

TAHUN ANGGARAN 2018



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai 1
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601
Cimahi 40513

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dapat terselesaikan. LKIP DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja dan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan DPMPTSP Kota Cimahi selama tahun 2018, sebagai komitmen kami untuk melaksanakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP DPMPTSP Tahun 2018 berisi informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan program, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi DPMPTSP Kota Cimahi sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018.

Cimahi, Januari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 merupakan sarana pertanggungjawaban Kinerja kepada *Stakeholders* serta masukan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis DPMPTS Kota Cimahi. LKIP ini menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2018 dikaitkan dengan Rencana Kerja Tahun 2018 yang disusun mengacu pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, DPMPTSP Kota Cimahi melaksanakan 8 program yang terdiri dari 32 kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari dana APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.10.608.074.731,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.654.310.731,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.953.764.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 10.155.533.907,00 (**95,73%**), yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.349.851.733,00 (**93,45%**) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.805.682.174,00 (**97,51%**).

Sasaran strategis DPMPTSP Kota Cimahi yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 tercapai seluruhnya sesuai target yang telah ditetapkan. Target program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 tercapai seluruhnya sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja DPMPTSP mencapai **100%**.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi.....	2
1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	3
1.2.3 Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	4
1.3 Landasan Hukum.....	5
1.4 Isu Strategis.....	6
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.....	9
2.2.1 Visi.....	9
2.2.2 Misi.....	11
2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.....	11
2.3.1 Tujuan.....	11
2.3.2 Sasaran.....	11
2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.....	11
2.4.1 Strategi.....	11
2.4.2 Kebijakan.....	12
2.5 Rencana Kinerja DPMPTSP.....	12
2.5.1 Program DPMPTSP.....	12
2.5.2 Kegiatan DPMPTSP.....	12
2.5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	14
2.5.4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi 2018.....	22
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.1.1. Pengukuran Kinerja.....	24

3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	30
3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	32
3.1.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
3.1.5. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	34
3.2. Realisasi Anggaran.....	35
35	
BAB 4 PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Hambatan dan permasalahan.....	37
4.3 S a r a n.....	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun pemerintah pusat dan daerah memperoleh anggaran belanja yang ditetapkan melalui Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah, melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran untuk pemerintah daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, yang merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *Output* dari perencanaan alokasi biaya atau *Input* yang telah ditetapkan. APBD yang diperoleh Perangkat Daerah digunakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun sebelumnya. Dokumen DPA memuat *input*, *output* (termasuk indikator dan target) serta *outcome*. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, setiap pemerintah daerah harus melaporkan kinerjanya pada akhir periode APBD.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Secara operasional, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang (pemberi mandat), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian dalam rangka pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif dan transparan diharapkan setiap instansi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2018 berisikan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Rencana Kerja Tahunan yang masing-masing memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah dicapai selama Tahun 2018.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Kota Cimahi merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Sedangkan DPMPTSP memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Sedangkan penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam

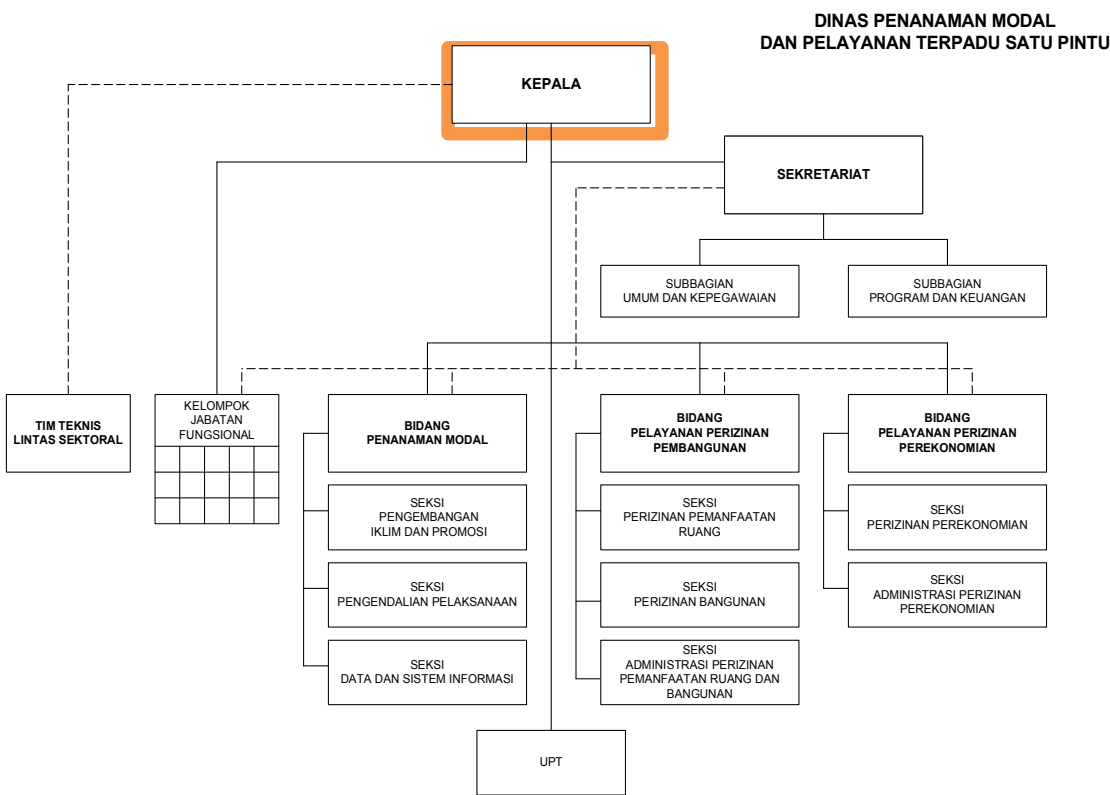
satu pintu dan satu tempat.

1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Peningkatan Iklim dan Promosi;
 - b. Seksi Data dan Sistem Informasi;
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan.
- 4. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahi :
 - a. Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Seksi Perizinan Bangunan;
 - c. Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
- 5. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian, membawahi:
 - a. Seksi Perizinan Perekonomian;
 - b. Seksi Administrasi Perizinan Perekonomian.
- 6. Tim Teknis Lintas Sektoral.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Cimahi

Gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S2	11	32
2.	D4/S1	22	65
3.	D3	1	3
JUMLAH TOTAL		34	100

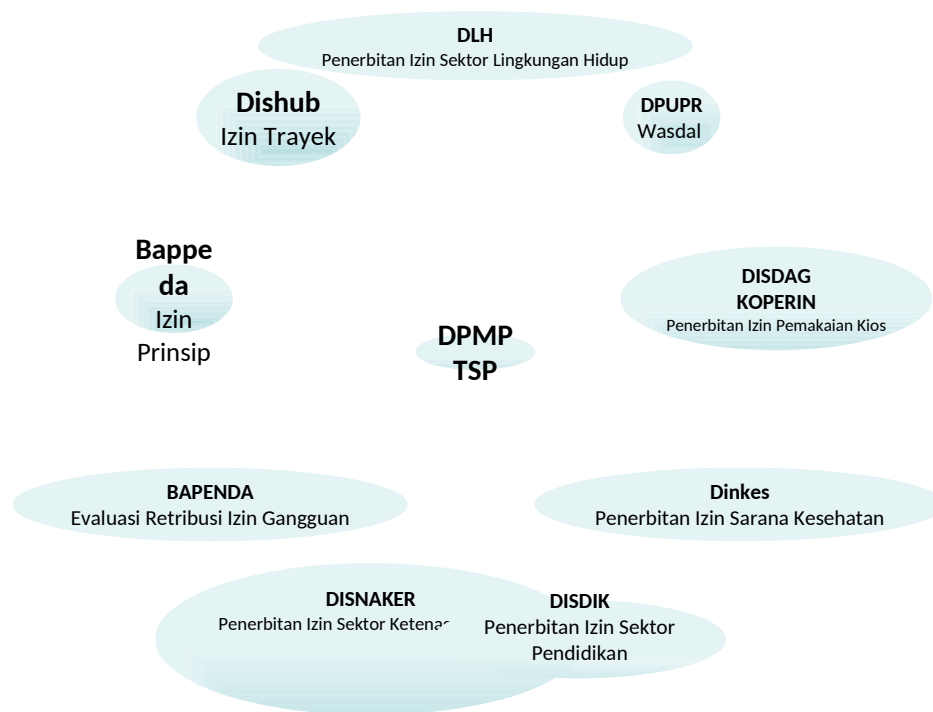
Tabel Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.2.3 Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Terkait tugas dan fungsinya, DPMPTSP membuat kebijakan-kebijakan terkait investasi dan perizinan, serta melaksanakan kegiatan untuk mempromosikan Kota Cimahi dan pelayanan perizinan.

Dalam pemberian izin dan urusan penanaman modal, DPMPTSP harus berkoordinasi dengan beberapa OPD, diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Dinas Lingkungan Hidup;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
10. Dinas Kesehatan;



1.3 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- n. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

1.4 Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP Kota Cimahi mengalami hambatan dan tantangan. Beberapa yang menjadi isu strategis DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

1. Penggalan data investasi untuk memperoleh data sesuai kondisi yang terjadi, agar tidak terjadi pengambilan kebijakan yang tidak sesuai;
2. Peningkatan penyebaran informasi mengenai investasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan di Kota Cimahi;
3. Perubahan drastis dalam sistem perizinan di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Online Single Submission (OSS) mengharuskan para pegawai DPMPTSP untuk memahami prosedur perizinan yang baru dan menjalankan sistem perizinan baru dalam waktu yang sangat cepat;
4. Keterbatasan sumber daya manusia di DPMPTSP. Pada satu sisi jumlah PNS sangat terbatas, namun di sisi lain penambahan THL sangat dibatasi. Hal ini menyebabkan satu orang pegawai mengerjakan beberapa pekerjaan, sehingga menghambat kelancaran pekerjaan di dalam DPMPTSP Kota Cimahi;
5. Selain keterbatasan pegawai, DPMPTSP Kota Cimahi juga memiliki keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pendidikan, sehingga jarang sekali pegawai yang mengikuti diklat atau pelatihan. Padahal pelatihan dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai;
6. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kota Cimahi. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2018 IKM DPMPTSP Kota Cimahi adalah 78.

Isu-isu strategis yang dihadapi DPMPTSP Kota Cimahi mengurangi kinerja dan kelancaran pekerjaan, untuk itu harus ditangani secara bijaksana, intensif dan berkesinambungan, karena masalah yang terjadi kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk itu upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan intensitas pendekatan terhadap para pelaku usaha agar diperoleh data yang lebih banyak dan akurat terkait data-data penanaman modal dan perizinan;
2. Pelaksanaan sosialisasi investasi dan perizinan harus tepat sasaran. Selain itu koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah di wilayah harus dilakukan;
3. Pegawai DPMPTSP harus menggali lagi regulasi-regulasi terbaru terkait penanaman modal dan perizinan, baik melalui pelatihan dan pendidikan kilat (diklat) mengenai penanaman modal dan perizinan, maupun dengan melakukan koordinasi yang lebih banyak dengan instansi provinsi dan pusat;

4. Pembangunan etos kerja dan karakter bekerja yang baik dapat meningkatkan kekompakan untuk mendukung pelaksanaan kerja tim DPMPTSP Kota Cimahi, sehingga hambatan dan tantangan yang ada dapat dihadapi bersama agar terasa lebih ringan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang telah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut, serta melakukan pengukuran hasil melalui umpan balik.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk menentukan pengukuran kinerja instansi/organisasi. Rencana strategis merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan di bidang investasi diharapkan mampu memperlihatkan secara jelas hubungan antara cara/langkah yang akan diambil inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat atas berkembangnya investasi daerah. Ada 3 unsur yang berperan sekaligus sebagai inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat yang saling berkaitan pengaruhnya untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan peran dan fungsi, sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator:

- a. Meningkatnya PDRB (*Product Domestic Ratio Brutto*) melalui peningkatan nilai tambah;
- b. Meningkatnya nilai tambah berarti akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- c. Memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat;
- d. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing.

2. Swasta

Peran swasta dalam kegiatan investasi dan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan investasi langsung yang berwawasan lingkungan di bidang produksi dan jasa maupun investasi tidak langsung melalui pasar modal;
- b. Kontribusi sosial di bidang pendidikan/pelatihan, kesehatan dan fasilitas umum;
- c. Memenuhi kewajiban membayar pajak/ retribusi perizinan tertentu;
- d. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Masyarakat

- a. Memberikan dukungan sosial;
- b. Melakukan pengawasan sosial;
- c. Turut menegakkan stabilitas politik dan keamanan.

Sesuai ketentuan yang berlaku DPMPSTSP telah membuat Rencana Strategis

(Renstra) untuk 5 tahun (2017-2022), sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi. Sesuai Renstra yang telah dibuat, pada tahun 2018 DPMPTSP Kota Cimahi mengalami perubahan Kegiatan dan Program. Beberapa Program dan Kegiatan dihilangkan karena tidak sesuai dengan urusan penanaman modal, yang merupakan urusan DPMPTSP.

2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Visi merupakan pedoman dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan.

2.2.1 Visi

Visi DPMPTSP pada Renstra 2017-2022 mengacu langsung pada visi RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yang merupakan cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022, yaitu “Mewujudkan **Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya**”. Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi, pada visi RPJMD 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu Maju, Agamis dan Berbudaya, yang masing-masingnya memiliki penjabaran.

Pertama, **Maju**. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan

berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas. Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional dalam pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

2.2.2 Misi

Misi DPMPTSP masuk pada Misi ketiga RPJMD Kota Cimahi, yakni “**Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan**”. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya serta pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang pada peningkatan Usaha Kecil Menengah.

2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

2.3.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta urusan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, yaitu “**Meningkatnya laju pertumbuhan investasi**”. Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan, maka indikator dari tujuan DPMPTSP Kota Cimahi adalah laju pertumbuhan Investasi, berupa persentase pertumbuhan investasi per tahun.

2.3.2 Sasaran

Dengan mengacu pada Tujuan DPMPTSP Kota Cimahi, maka ditetapkan sasaran DPMPTSP untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu “**Meningkatnya nilai investasi**”. Indikator untuk melihat pencapaian sasaran DPMPTSP Kota Cimahi adalah nilai realisasi investasi, berupa nominal realisasi investasi per tahun.

2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

2.4.1 Strategi

Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya strategi harus dipertimbangkan dengan baik agar bisa mencapai sasaran. Sesuai Renstra DPMPTSP Kota Cimahi sasaran akan diupayakan tercapai melalui 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan.

2.4.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Sesuai dengan Renstra 2017-2022, maka arah kebijakan DPMPTSP Kota Cimahi adalah :

1. Peningkatan promosi penanaman modal;
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Peningkatan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Pembangunan.

2.5 Rencana Kinerja DPMPTSP

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

2.5.1 Program DPMPTSP

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi terdiri dari:

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- E. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- F. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- G. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

2.5.2 Kegiatan DPMPTSP

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
6. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
13. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
14. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan;
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pembinaan Pegawai

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

F. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
2. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.

G. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
2. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;
5. Kegiatan Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;
6. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan.

H. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1. Kegiatan Sertifikasi ISO.

2.5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan kegunaannya, yang merupakan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dan merupakan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja : Peningkatan Kinerja
Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja : Meningkatnya kinerja pegawai dan tersedianya seragam dinas
Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja : Terlaksananya pelatihan bagi pegawai DPMPTSP
Kelompok Sasaran : Pegawai DPMPTSP Kota Cimahi.
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelompok Sasaran : Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPMPTSP Kota Cimahi.
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

F. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator Kinerja : Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM
Kelompok Sasaran : Pelaku usaha di Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

G. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Indikator Kinerja : Jumlah izin yang dapat dilayani sesuai Standar Pelayanan
Kelompok Sasaran : Pemohon izin di Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

H. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Indikator Kinerja : Tersedianya pedoman Standar Pelayanan di lingkungan DPMPTSP Kota Cimahi
Kelompok Sasaran : Masyarakat pemohon izin di Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

Rencana program dan kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja, target dan anggaran dipaparkan pada Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 DPMPTSP Kota Cimahi disusun sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
				Target Capaian Kinerja	Pendanaan Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran		Rp. 647.032.000,00	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran surat menyurat dinas	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Rp. 6.420.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon, faksimili, pulsa sms gateway, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon, faksimili, pulsa sms gateway, listrik, dan air (%)	100%	Rp. 22.500.000,00	APBD
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi kendaraan dinas yang dibayar (5 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2) (%)	100%	Rp. 18.000.000,00	APBD
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100%	Rp. 40.050.000,00	APBD
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan	100%	Rp. 14.042.000,00	APBD
6	Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan untuk pemeliharaan kebersihan kantor	100%	Rp. 18.190.000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja kantor	100%	Rp. 49.500.000,00	APBD
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	100%	Rp. 95.200.000,00	APBD
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan kantor	100%	Rp. 79.000.000,00	APBD
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan pemeliharaan jaringan	100%	Rp. 5.000.000,00	APBD
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tersedianya bahan bacaan dan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	100%	Rp. 12.000.000,00	APBD

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
				Target Capaian Kinerja	Pendanaan Indikatif	Sumber Dana
	Peraturan Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan				
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan minuman untuk pegawai dan tamu insidentil	100%	Rp. 11.400.000,00	APBD
13	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasan	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan makan dan minum sesuai kebutuhan untuk rapat, pegawai dan tamu dinas	100%	Rp. 79.050.000,00	APBD
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan akomodir rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi	100%	Rp. 196.680.000,00	APBD
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	Peningkatan Kinerja		Rp. 932.128.400,00	APBD
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan	Tersedianya sarana prasarana pendukung pemerintahan	Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan	100%	Rp. 80.000.000,00	APBD
2	Peningkatan saran dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Jumlah bulan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 650.453.400,00	APBD
3	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara rutin/berkala	100%	Rp. 201.675.000,00	APBD
			Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara rutin/berkala			

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
				Target Capaian Kinerja	Pendanaan Indikatif	Sumber Dana
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai dan tersedianya seragam dinas	Peningkatan Kinerja		Rp. 23.800.000,00	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	Rp. 23.800.000,00	APBD
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai dan tersedianya seragam dinas	Peningkatan Kinerja		Rp. 52.277.049,09	APBD
	Pembinaan pegawai	Meningkatnya kapasitas pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pembinaan pegawai	100%	Rp. 57.277.049,09	APBD
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Rp. 82.771.000,00	APBD
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	6 dokumen	Rp. 76.625.600,00	APBD
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran APBD semester 1 (dokumen)	1 dokumen	Rp. 5.345.400,00	APBD
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1 dokumen	Rp. 800.000,00	APBD
F	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya pelaporan kegiatan investasi dan minat investasi	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM		Rp. 1.564.382.000,00	APBD
1	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.	Meningkatnya jumlah perusahaan berizin yang memberikan LKPM dan data jumlah investasi di Kota Cimahi	1. Jumlah pelaksanaan Forum Temu Usaha	4 kegiatan	Rp. 319.446.200,00	APBD
			2. Jumlah dokumen media promosi			
			3. Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal			
			4. Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal			

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
				Target Capaian Kinerja	Pendanaan Indikatif	Sumber Dana
2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatnya jumlah kerjasama investasi	4. Jumlah dokumen pendataan dan pelaporan LKPM	3 Dokumen; 3 Kegiatan	Rp. 239.085.200,00	APBD
			5. Jumlah kegiatan pelatihan petugas pendampingan pengisian LKPM			
			6. Jumlah sosialisasi LKPM			
			7. Jumlah dokumen pelaporan dan pendataan perusahaan non-SPIPISE			
			8. Jumlah fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim gugus (task force)			
3	Penyelenggaraan pameran investasi	Meningkatnya promosi investasi Kota Cimahi	Jumlah pameran (tingkat lokal, regional, nasional dan internasional)	9 pameran	Rp. 1.005.850.600,00	APBD
G	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya pengajuan perizinan	Jumlah izin yang dapat dilayani sesuai Standar Pelayanan		Rp. 1.286.193.240,00	APBD
1	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Tersedianya database perizinan untuk kemudahan bagi masyarakat memperoleh informasi dan melakukan proses perizinan	1. Jumlah modul sistem informasi penanaman modal dan migrasi databse izin ke SiPinter	1. 4 Modul; 2. 20 Konten.	Rp. 431.707.970,00	APBD
			2. Jumlah konten untuk updating konten (kandungan) media informasi pelayanan perizinan			
2	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan perekonomian	1. Jumlah Tim Teknis yang mendukung proses perizinan	1. 1 Tim; 2. 1 Kegiatan;	Rp. . 231.129.000,00	APBD

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
				Target Capaian Kinerja	Pendanaan Indikatif	Sumber Dana
	penanaman modal		2. Jumlah sosialisasi multimedia perizinan perekonomian	3. 12 Bulan.		
			3. Durasi waktu pelayanan perizinan 1 (satu) hari			
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Memperluas cakupan pelayanan perizinan perekonomian kepada masyarakat	Jumlah monitoring perizinan usaha (GIS)	3 Dokumen; 2 Kegiatan	Rp. 174.405.000,00	APBD
			Jumlah kegiatan digitasi arsip perizinan perekonomian			
			Jumlah evaluasi izin usaha mikro			
			Jumlah SKM perizinan perekonomian			
4	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan	Mempermudah dan mempercepat persyaratan IMB	1. Jumlah pedoman pembuatan dan Penilaian dokumen rencana teknis	1. 2 Dokumen; 2. 20 Dokumen	Rp. 111.912.430,00	APBD
			2. Jumlah dokumen rencana teknis bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro			
5	Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan Pembangunan	Meningkatnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait perizinan pembangunan	1. Jumlah sosialisasi Perizinan Pembangunan	1. Kegiatan; 2. 1 Paket; 3. 400 Buah	Rp. 177.874.040,00	APBD
			2. Jumlah layanan izin melalui media digital (animasi) dan leaflet			
			3. Jumlah Papan IMB			
6	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan	Tersedianya produk hukum sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap pelayanan perizinan pembangunan	Jumlah dokumen Naskah Akademis Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	4 dokumen	Rp. 159.164.800,00	APBD
			Jumlah Dokumen Regulatory Impact Assesment (RIA) Penerbitan Izin Reklame			

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
				Target Capaian Kinerja	Pendanaan Indikatif	Sumber Dana
			Jumlah Dokumen Inventarisasi KRK tahun 2017			
			Jumlah dokumen Hasil Survey dan Pengolahan Data KRK tahun 2018			
H	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kelancaran pelaksanaan tugas di organisasi	Tersedianya pedoman Standar Pelayanan di lingkungan DPMPSTSP Kota Cimahi		Rp. . 60.727.042,00	APBD
1	Sertifikasi ISO	Terjaganya kepercayaan publik terhadap organisasi	Jumlah sertifikasi eksternal ISO 9001:2015	1 kegiatan	Rp. . 60.727.042,00	APBD

2.5.4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA CIMAHI

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	0,11%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai indeks kepuasan masyarakat	78

PROGRAM		ANGGARAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	647,032,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	932,128,400
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	23,800,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	57,277,049
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	82,771,000
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	1,564,382,000
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	1,286,193,240
8	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp	60,727,042
Jumlah Anggaran		Rp	4,654,310,731

Cimahi, November 2018

WALI KOTA CIMAHI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI**

**Ir. H. AJAY MUHAMMAD
PRIATNA, MM.**

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Tk. I
NIP. 19660214 199202 2 001

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator masukan (*Input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur berupa indikator atau ukuran kinerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data internal (sistem informasi yang ditetapkan pada instansi);
2. Data eksternal (berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder).

Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, capaian kinerja kegiatan tersebut pengukurannya dapat diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Input : adanya dana yang dianggarkan sebesar Rp. 6.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.058.000,00 (47,60 %)

Output : terpenuhinya jasa surat menyurat

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Input : adanya dana yang dianggarkan sebesar Rp. 22.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.897.863 (79,55 %)

Output : terpenuhinya pembayaran telepon, internet, faximili, pulsa sms gateway untuk sarana komunikasi, listrik dan air

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

Input : adanya dana yang dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.429.020,00 (91,27 %)

Output : terpenuhinya pembayaran asuransi kendaraan dinas (5 unit

kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2)

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

Input : adanya dana yang dianggarkan sebesar Rp. 40.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.583.700,00 (91,35 %).

Output : pemeliharaan kendaraan dinas

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

Input : adanya dana yang dianggarkan sebesar Rp. 14.042.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.628.000,00 (82,81 %).

Output : tertibnya administrasi keuangan

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Input : adanya dana yang dianggarkan sebesar Rp. 18.190.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.950.000,00 (98,68 %)

Output : tersedianya peralatan, bahan pembersih dan tenaga kebersihan untuk pemeliharaan kebersihan kantor

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 49.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.023.500,00 (46,51 %)

Output : perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja kantor

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- h. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 95.200.000,00 dengan realisasi Rp. 94.690.000,00 (99,46 %)

Output : tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- i. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 79.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 65.045.000,00 (82,34 %)

Output : tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- j. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.258.000,00 (65,16 %)

Output : tersedianya komponen instalasi listrik dan pemeliharaan jaringan

Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

- k. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.500.000,00 (95,83 %)
Output : tersedianya bahan bacaan untuk mendapatkan informasi penunjang pelaksanaan tugas
Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi
- l. Kegiatan Bahan Logistik Kantor;
Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 11.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.472.000,00 (74,32 %)
Output : tersedianya kebutuhan minuman untuk pegawai dan tamu insidentil
Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi
- m. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 79.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.555.200,00 (61,42 %)
Output : tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan dinas untuk rapat, pegawai dan tamu dinas
Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi
- n. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
Input : adanya dana dianggarkan sebesar Rp. 196.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 194.763.366,00 (99,03 %)
Output : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi
Outcome: meningkatnya pelayanan administrasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 80.000.00000 (100,00 %)
Output : kelancaran pelaksanaan administrasi kedinasan
Outcome: meningkatnya kinerja aparatur
- b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 650.453.400,00 dan realisasi sebesar Rp. 581.207.963,00 (89,35 %)
Output : Peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan prioritas, Cinderamata dan THL Kanto
Outcome: meningkatnya kinerja aparatur
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 201.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 158.104.000,00 (78,40 %)
Output : pemeliharaan rutin kendaraan dinas 5 unit kendaraan dinas roda 4, 15 unit kendaraan roda 2

Outcome: meningkatnya kinerja aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 23.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.800.000,00 (100,00 %)

Output : peningkatan disiplin dan pelayanan terhadap masyarakat

Outcome: meningkatnya kinerja pegawai

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai;

- a. Kegiatan Pembinaan Pegawai

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 57.277.049,09 dan realisasi sebesar Rp. 53.977.000,00 (94,24 %)

Output : jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pembinaan pegawai

Outcome: terselenggaranya kegiatan pembinaan pegawai

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 76.625.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 69.853.300,00 (91,16 %)

Output : dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen) dan FGD

Outcome: meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

- b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 5.345.400,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.615.400,00 (48,93 %)

Output : tersusunnya laporan realisasi anggaran APBD semester I

Outcome: meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

- c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 800.000,00 (100,00 %)

Output : tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun

Outcome: meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

- a. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 319.446.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 308.867.241,00 (96,69 %)

Output : 1. terlaksananya Forum Temu Usaha (FTU);
2. terlaksananya penyusunan media informasi;

3. terlaksananya fasilitasi kerjasama penanaman modal;
4. terlaksananya seminar investasi.

Outcome: meningkatnya pelaporan kegiatan investasi dan minat investasi

- b. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 239.085.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 220.157.933,00 (92,08 %)

Output : 1. pendataan dan pelaporan LKPM;
2. Pelatihan petugas pendampingan pengisian LKPM;
3. Sosialisasi LKPM;
4. Pelaporan dan pendataan perusahaan Non SPIPISE;
5. Fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim gugus (*task force*).

Outcome: meningkatnya pelaporan kegiatan investasi dan minat investasi

- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 1.005.850.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 994.846.526,00 (98,91 %)

Output : 1. melaksanakan Pameran Pembangunan HUT Kota Cimahi;
2. melaksanakan Pameran Festival Gedung Sate;
3. Ritech Expo;
4. supporting Regional Investment Forum;
5. supporting Pameran Trade Expo;
6. melaksanakan Pameran Investasi;
7. melaksanakan Pameran Klaster Telematika;
8. melaksanakan Penyusunan Roadmap Investasi di Bidang Telematika.

Outcome: meningkatnya pelaporan kegiatan investasi dan minat investasi

g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- a. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 431.707.970,00 dan realisasi sebesar Rp. 410.541.779,00 (95,10 %)

Output : 1. jumlah modul sistem informasi;
2. updating konten media informasi pelayanan perizinan.

Outcome: meningkatnya pengajuan perizinan

- b. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 231.129.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 228.965.900,00 (99,06 %)

Output : 1. terbentuknya Tim Teknis yang mendukung proses perizinan;
2. terlaksananya sosialisasi perizinan perekonomian;
3. terwujudnya pelayanan perizinan.

Outcome: meningkatnya pengajuan perizinan

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 174.405.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 172.216.000,00 (98,74 %)

Output : 1. terwujudnya monitoring perizinan usaha (GIS);
2. pelaksanaan digitasi arsip perizinan perekonomian;
3. pelaksanaan valuasi izin usaha mikro;
4. telaksananya SKM perizinan perekonomian.

Outcome: meningkatnya pengajuan perizinan

d. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 111.912.430,00 dan realisasi sebesar Rp. 107.303.800,00 (95,88 %)

Output : 1. pedoman pembuatan dan penilaian dokumen rencana teknis;
2. fasilitasi dokumen rencana teknis bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro.

Outcome: meningkatnya pengajuan perizinan

e. Kegiatan Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan Pembangunan

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 177.874.040,00 dan realisasi sebesar Rp. 173.420.500,00 (97,50 %)

Output : 1. terselenggaranya sosialisasi Perizinan Pembangunan;
2. tersedianya layanan izin melalui media digital (animasi) dan leaflet;
3. tersedianya papan IMB.

Outcome: meningkatnya pengajuan perizinan

f. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 159.164.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 149.176.700,00 (93,72 %)

Output : 1. penyusunan naskah akademis Raperda;
2. tersedianya dokumen inventarisasi KRK tahun 2017
3. tersedianya dokumen hasil survey dan pengolahan data KRK tahun 2018.

Outcome: meningkatnya pengajuan perizinan

h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a. Kegiatan Sertifikasi ISO

Input : adanya dana dari rencana sebesar Rp. 60.727.042,00 dan realisasi sebesar Rp. 60.727.042,00 (100,00 %)

Output : terselenggaranya sertifikasi eksternal ISO 9001:2015

Outcome: kelancaran pelaksanaan tugas di organisasi

3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran.

Tabel Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	= Nilai realisasi tahun n – Nilai realisasi tahun n-1	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ $\text{Bobot Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0.071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM (antara 25-100), maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : IKM unit pelayanan x 25	Bidang Perizinan
3	Meningkatkan performa organisasi	Jumlah sertifikasi manajemen	Sertifikasi ISO 9001:2015	Sekretariat

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2018 DPMPTSP Kota Cimahi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rupiah	9.007.040.000.000	9.744.433.463.274,47	108,19
2	Men	Nilai indeks	Indeks	78	78	100

	ingk atny a pela yan an pri ma kep ada mas yar akat	kepuasan masyarakat					
3	Men ingk atny a perf orm a org anis asi	Jumlah sertifikasi manajemen	Sertifikasi	1	1	100	

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Akhir Tahun Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI					TARGET RENSTRA TAHUN 2018	CAPAIAN Thn 2018 Thd Renstra
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	Nilai realisasi investasi	Rupiah	3.027.923.628.344,00	3.543.835.320.764,00	3.910.652.102.380,00	7.213.569.420.186,00	8.953.319.609.542,00	9.007.040.000.000,00	9.744.433.463.274,47
2	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks					75	78	100%
3	Jumlah sertifikasi manajemen	Sertifikasi			1	1	1	1	100%

NO	SASARAN	SATUAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		KETERANGAN
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	

1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Rupiah	N/A	8.953.319.609.542,00	9.007.040.000.000,00	9.744.433.463.274,47	terjadi peningkatan realisasi investasi
2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks	75	75	78	78	terjadi peningkatan indeks
3	Meningkatkan performa organisasi	Sertifikasi	1	1	1	1	-

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

3.1.3. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *Output* dan *Input* baik untuk rencana maupun realisasi, analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *Output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *Input* tertentu, selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil serta manfaat dan dampak. Evaluasi kinerja juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis atas capaian kinerja DPMPSTSP Kota Cimahi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	

1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rupiah	9.007.040.000.000,00	9.744.433.463.274,47	108,19
Permasalahan: Nilai realisasi investasi dari LKPM dan data Non-SPIPISE belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan, karena terbatasnya pegawai DPMPTSP Kota Cimahi sehingga belum dapat melakukan pendataan secara riil ke lapangan. Terkadang meskipun nilai investasi di Kota Cimahi meningkat namun banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Sehingga terkadang ada lokasi-lokasi bekas pabrik yang terbengkalai. Hal ini sangat disayangkan karena tanah dan bangunan merupakan investasi. Apabila tanah dan bangunan yang terbengkalai dapat dimanfaatkan, hal ini dapat menambah perolehan investasi di Kota Cimahi.				Solusi: Meningkatkan koordinasi dengan dinas lain terkait, misal Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk memperoleh data mengenai pelaku usaha/ perusahaan di Kota Cimahi.		
2	Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks	78	78	100
Permasalahan: Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang disurvei, ada 5 (lima) unsur yang masih di bawah rata-rata, yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; produk pelayanan; serta sarana dan prasarana.				Solusi: Upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah: 1. melakukan review terhadap peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan perizinan; 2. melakukan penyederhanaan prosedur; 3. penyederhaan persyaratan bagi pelaku usaha lokal dan bantuan sebagai salah satu insentif/ rangsangan bagi pengembangan UMKM; 4. melakukan sosialisasi perizinan agar masyarakat tertarik untuk mengurus perizinan secara langsung.		
3	Meningkatnya performa	Jumlah sertifikasi manajemen	Sertifikasi	1	1	100

	organisasi					
Permasalahan: Banyaknya evaluasi rutin yang belum dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam manajemen mutu organisasi, meskipun hal tersebut bukan masalah fatal. Namun hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal masih kurang dilakukan.				Solusi: Melakukan penjadwalan evaluasi dengan melakukan koordinasi yang baik dan cermat dengan jadwal kegiatan lainnya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih rapat evaluasi, dan bisa menyelaraskan evaluasi yang dilakukan.		

3.1.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SUMBER DAYA	KONDISI	CAPAIAN 2018	EFISIENSI	KETERANGAN
1	Jumlah dana	4.654.310.731	4.349.432.733	6,55%	Dana digunakan untuk 32 Kegiatan
2	Pegawai	PNS : 34 orang THL : 16 orang	PNS : 34 orang THL : 16 orang	-	Dengan izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Cimahi lebih dari 60 izin, SDM yang ada sangat kurang untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum optimal.
3	Waktu	12 bulan	12 bulan	-	Semua capaian kinerja dilaksanakan dalam waktu 12 bulan
4	Sarana Prasarana	Ruangan; Mebelair; Peralatan kerja	Ruangan; Mebelair; Peralatan kerja	-	Semua sarana prasarana digunakan secara maksimal

3.1.5. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Semua program atau kegiatan pada DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2018 menunjang pada keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan IKU DPMPTSP tahun 2018 tercapai, namun IKM masih B kurus (dekat dengan batas bawah predikat B), sertifikasi ISO diperoleh namun pelaksanaan evaluasi belum dapat dilakukan secara intensif seperti seharusnya dalam ISO 9001:2015 (meskipun hal ini bukan masalah fatal), dan nilai realisasi investasi tercapai lebih dari target namun

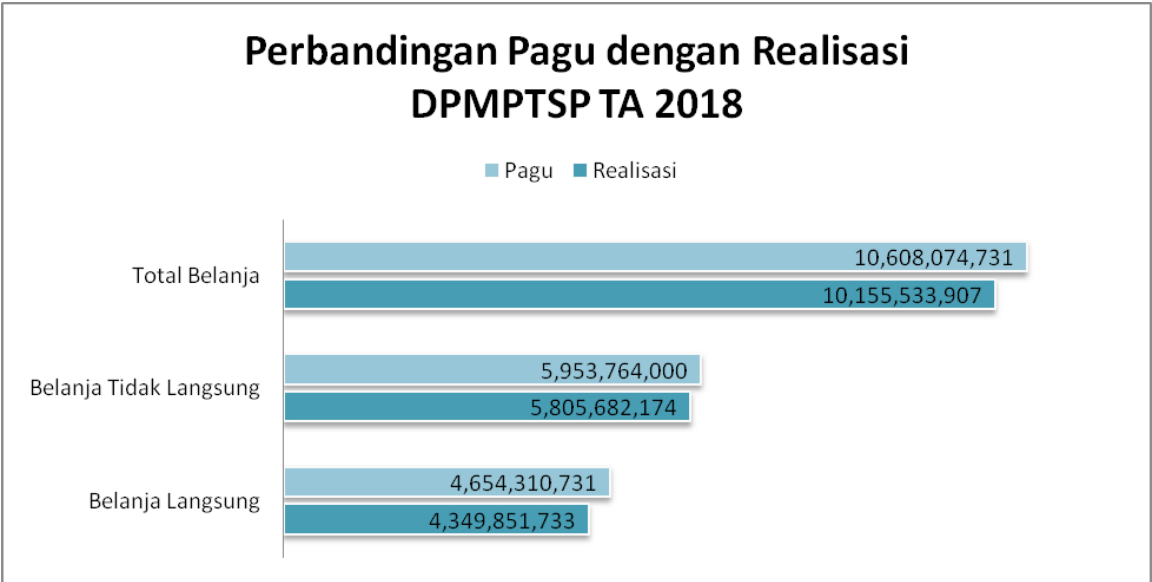
belum mewakili kondisi riil investasi di Kota Cimahi.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.608.074.731,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.155.533.907,00 **(95,73%)** sehingga sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 452.540.824,00

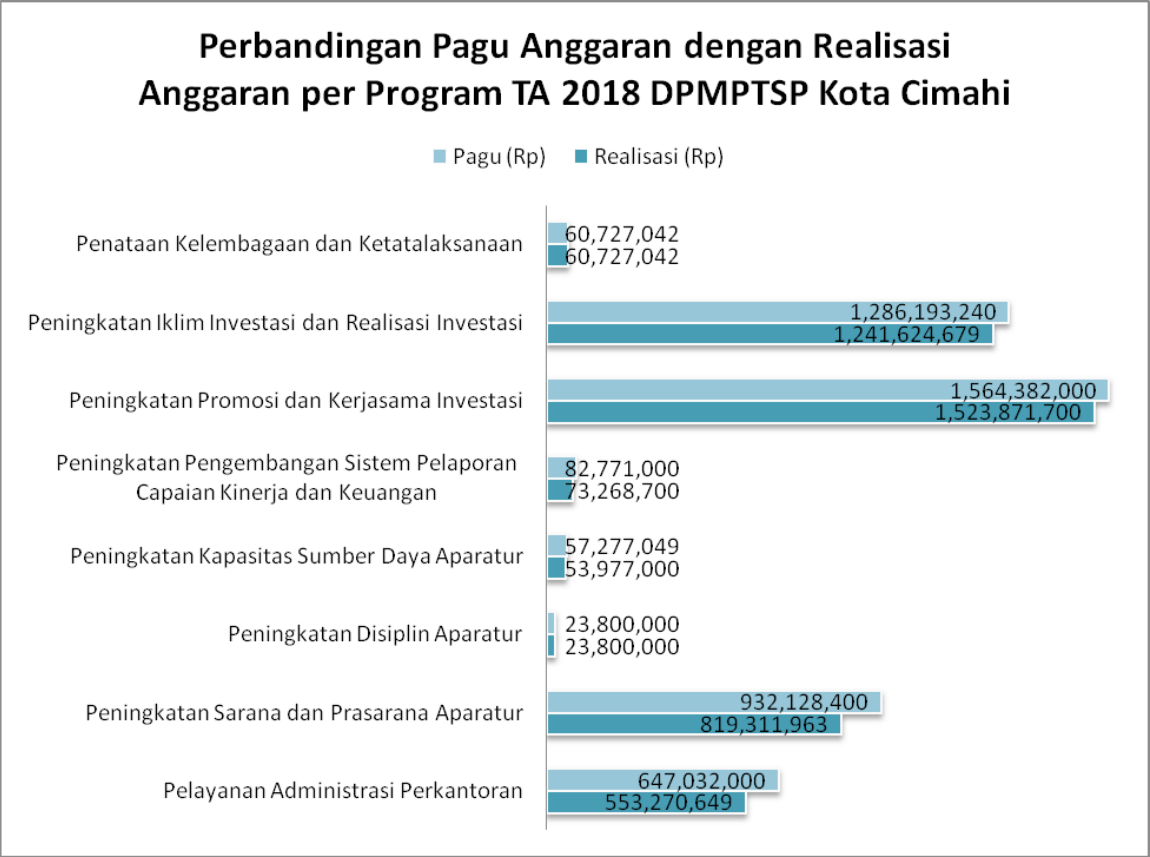


Alokasi anggaran untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 4.654.310.731,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.349.851.733,00 **(93,45%)**. Sedangkan untuk alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.953.764.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.805.682.174,00 **(97,51%)**.



Untuk perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Program	Anggaran		Capaian (%)	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (%)	Realisasi (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647.032.000	553.270.649	100	85,51
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	932.128.400	819.311.963	100	87,90
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.800.000	23.800.000	100	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.277.049	53.977.000	100	94,24
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82.771.000	73.268.700	100	88,52
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.564.382.000	1.523.871.700	100	97,41
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.286.193.240	1.241.624.679	100	96,53
8	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	60.727.042	60.727.042	100	100



**BAB 4
PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi secara keseluruhan dapat mencapai target-target dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk urusan Penanaman Modal, memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaku usaha dan lainnya, namun demikian pelaksanaannya masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan.

4.2 Hambatan dan permasalahan

Hambatan dan permasalahan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2018, diantaranya:

1. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah izin yang ditangani dirasakan masih belum seimbang, saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruhnya 34 orang dengan jumlah izin yang ditangani lebih dari 60 jenis izin. THL yang berjumlah 16 orang masih belum dapat menyeimbangkan beban pekerjaan dengan jumlah pegawai.
2. Pegawai DPMPSTSP Kota Cimahi banyak yang merangkap, disamping bertugas sebagai pelaksana mereka juga sebagai *Tim Pengelola Keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola program dan kegiatan*, yang mana hal ini berdampak pada hasil kerja yang diperoleh *kurang maksimal* karena konsentrasi dari pegawai yang terpecah-pecah.

3. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semua izin pengurusan administrasinya atau pendaftarannya dilaksanakan di DPMPTSP. Hal ini menyebabkan jumlah izin yang ditangani oleh DPMPTSP bertambah banyak, sehingga menambah beban pekerjaan untuk pegawai, khususnya di pelayanan.
4. Pelayanan perizinan masih belum dapat berjalan secara optimal khususnya masalah ketepatan waktu proses. Seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian izin karena:
 - standar pelayanan yang belum diterapkan secara baik terutama oleh dinas teknis terkait dalam menerbitkan rekomendasi;
 - keterbatasan sumber daya manusia pendukung pelayanan perizinan.
5. Peraturan yang mengatur berbagai macam izin di layani oleh DPMPTSP Cimahi cukup banyak, sehingga menuntut pegawai/petugas untuk dapat menguasai berbagai macam peraturan tersebut. Oleh karenanya peningkatan kapasitas pegawai sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
6. Penataan ruangan belum memadai sehingga kondisi kerja kurang nyaman dan hal ini terkadang mengganggu konsentrasi pegawai.

4.3 S a r a n

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan pelayanan perizinan secara prima, disarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penambahan pegawai agar proses pelayanan perizinan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
2. Sistem pelayanan perlu dirubah agar terjadi efisiensi waktu dan sumber daya manusia (SDM). Perubahan tersebut antara lain melakukan setting ulang penempatan dan pembagian SDM sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi pelayanan (*customer service*, informasi, verifikasi berkas, *data entry*, petugas lapangan, penyerahan izin dan pembuatan SKRD/laporan).
3. Perlu diadakan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai DPMPTSP Kota Cimahi. Kegiatan tersebut antara lain Diklat, BinteK, Pendidikan Berjenjang lainnya, serta Pembinaan Pegawai (*Outbond*).
4. Diperlukan penataan ruangan agar pegawai merasa nyaman melakukan tugasnya meskipun melaksanakan tugas yang merangkap karena kurangnya personil.
5. Penerapan SP dan SOP harus diterapkan secara disiplin.